

**PARTISIPASI *PUBLIK DELIBERATIF* BERBASIS *WEBSITE* DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH**

(Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar dalam Magister Ilmu
Pemerintahan



Oleh ,

MUHAMMAD FATCHURIZA

NIM. 20131040041

PROGAM STUDI

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2015



MOTTO

“ Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turutilah dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT “

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Karya kecilku ini Ku persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dalam perjalanan hidupku dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangatiku dalam meraih cita-citaku, dan juga teruntuk bidadariku yang selalu sabar, ikhlas, dan penuh cinta mendampingiku dalam mengarungi dunia fana menuju akhirat sana “

My Family

&

Istriku Iffah Syarifah

limpahan rahmat dan karunia sehingga tesis yang berjudul **Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014)** dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY). Dalam penulisan tesis ini tidak pernah lepas dari bimbingan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

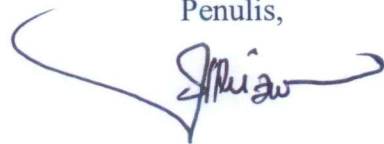
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M. A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Dyah Mutiarin selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Achmad Nurmandi selaku dosen pembimbing yang sabar dalam memberikan koreksi dan masukan.
4. Ibu Rahmawati Husein selaku dosen penguji I yang telah memberikan koreksi, pertimbangan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Titin Purwaningsih selaku dosen penguji II yang telah memberikan koreksi, pertimbangan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Pascasarjana MIP UMY yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Staff dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas segala bentuk dukungan dan kemudahan selama melakukan studi dan penulisan tesis.

8. Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Kantor Pelayanan Perizinan Sleman yang telah memberikan kemudahan perizinan penelitian
9. Humas Setda Sleman bagian Informasi dan Dokumentasi yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan data dalam penulisan tesis ini.
10. Instansi/SKPD terkait yang telah bersedia memberikan waktu, informasi dan data dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 05 Januari 2016

Penulis,



Muhammad Fatchuriza

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN KEASLIAN	iv
LEMBAR REVISI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	10
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
II.1. Kajian Pustaka	12
II.2. Kerangka Teori.....	28
II.2.1. Partisipasi Masyarakat.....	28
II.2.2. Partisipasi Publik Berbasis <i>Website</i>	40
II.2.3. Kebijakan Publik Deliberatif.....	43
II.3. Definisi Konseptual	47

V.1 Hasil Penelitian Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis <i>Website</i> dalam Perumusan Kebijakan Daerah di KPP	
Kabupaten Sleman	81
V.1.1 Sarana Partisipasi yang dapat dimanfaatkan Masyarakat	82
V.1.2 Isi Partisipasi Publik	87
V.1.3 Unit Pengelola Partisipasi Publik	89
V.2 Analisis Tahapan Partisipasi Publik Deliberatif	96
V.2.1 <i>Influence</i>	96
V.2.1.1 Partisipasi Warga Masyarakat dalam Menyampaikan Kebutuhan dan Masalah yang Dihadapinya	96
V.2.2 <i>Inclusion</i>	101
V.2.2.1 Adanya Ruang Untuk Menyampaikan Partisipasi Masyarakat	101
V.2.2.2 Adanya Tanggapan atau Respon dari Pemerintah	104
V.2.3 <i>Deliberation</i>	115
V.2.3.1 Keterlibatan masyarakat dalam Proses Pengawasan dan Kontrol	115
V.2.3.2 Masyarakat Terlibat Secara Aktif dalam Formulasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah	119
V.3 Analisis Tingkat Partisipasi Publik Deliberatif	122
V.3.1 Analisis Keaktifan Mengemukakan Pertanyaan, Masukan/Saran/Usul	123
V.3.2 Analisis Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep	

Perumusan Kebijakan Daerah	127
V.3.3 Analisis Keterlibatan dalam Memberikan Persetujuan terhadap Rumusan Kebijakan Daerah	130
V.3.4 Analisis Tingkat Partisipasi Publik Keseluruhan.....	133
V.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis <i>Website</i>	139
V.4.1 Faktor Pendorong Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis <i>Website</i>	140
V.4.2 Faktor Penghambat Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis <i>Website</i>	142
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan	143
VI.2 Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2. 2 Tahapan Demokrasi Deliberasi	49
Tabel 2. 3 Tingkatan Partisipasi Arnstein	50
Tabel 3. 1 Data Primer	53
Tabel 3. 2 Data Sekunder	54
Tabel 3. 3 Jumlah Data Responden	61
Tabel 4. 1 Letak Geografis dan Batas Wilayah Kab. Sleman	67
Tabel 4. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Sleman	69
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman	72
Tabel 4. 4 Data Pegawai BPMPTT Kabupaten Sleman	79
Tabel 5. 1 Jumlah Saran dan Keluhan Melalui <i>Website</i>	87
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Pengaduan di Humas Setda Sleman	97
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Aduan berdasarkan Tujuan SKPD	106
Tabel 5. 4 Aduan/Keluhan Masyarakat ke KPP Sleman	109
Tabel 5. 5 Aduan/Keluhan Masyarakat ke DPPD Sleman	111
Tabel 5. 6 Aduan/Keluhan Masyarakat ke KLH Sleman	114
Tabel 5. 7 Pengawasan dan Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Daerah	118
Tabel 5. 8 Tingkat Keaktifan Mengemukakan Masukan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	124
Tabel 5. 9 Tingkat Keterlibatan Dalam Menetapkan Konsep Perumusan Kebijakan Daerah	128
Tabel 5. 10 Tingkat Keterlibatan Memberikan Persetujuan Terhadap Perumusan Kebijakan Daerah	132
Tabel 5. 11 Tingkat Partisipasi Publik Deliberatif Dalam Perumusan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 Aduan yang Masuk Melalui Website Humas Setda Sleman	
Tahun 2014 – 2015	95

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir	46
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman	68

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPMPT	: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPPD	: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ICT	: Information and Communication Technology
KPP	: Kantor Pelayanan Perizinan
KLH	: Kantor Lingkungan Hidup
LSM	: Lembaga Swasembada Masyarakat
PPID	: Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
RAPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SAK	: Sistem Administrasi Kependudukan
SIMPPT	: SIM Pelayanan Perijinan Terpadu
SOP	: Standar Operating Prosedur
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPIK	: Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan
UU KIP	: Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik